



KONTRA-RADIKALISME MELALUI PROGRAM DESA LEWU ISSEN MULANG DI KALIMANTAN TENGAH

*(Counter-Radikalism Through The Lewu Issen Mulang Village Program
In Central Kalimantan)*

Ja'far Sodiq

Prodi Strategi Kampanye Militer, FSP, UNHAN RI
Jafarsodiq@gmail.com

Abstrak

Potensi paparan radikalisme di Kalimantan Tengah berada di urutan ke empat secara nasional. Permasalahan penelitian adalah kurang optimalnya upaya pencegahan radikalisme yang ada di Kalimantan Tengah. Sehingga penelitian bertujuan untuk melakukan analisis sinergitas TNI-Polri dalam menangkal paham radikalisme melalui program Desa Lewu Issen Mulang di Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi tidak terstruktur, serta dokumentasi untuk lebih memperkuat hasil penelitian. Pembahasan penelitian dalam Program Desa Lewu Issen Mulang sebagai pilot project dalam pencegahan radikalisme di wilayah Kabupaten Katingan Kalbar menggunakan konsep keterlibatan masyarakat yaitu adanya citizen control, delegated power, partnership, placation dan consultation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Program Desa Lewu Issen Mulang terdapat pencegahan paham radikalisme dengan penanaman ideologi Pancasila serta melibatkan masyarakat sebagai kunci pencegahan radikalisme. Adapun aktor-aktor dalam masyarakat yang terlibat erat dalam pencegahan radikalisme adalah Masyarakat Kabupaten Katingan itu sendiri, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Lurah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupten Katingan, Polresta Kab. Katingan, Dandim 1015/Sampit dan Pemda Kab Katingan. Sehingga, kesimpulan penelitian adalah Sinergisitas TNI-Polri melalui Desa Issen Mulang tidak hanya sekedar memperhatikan aspek Kamtibmas tetapi juga aspek ketahanan wilayah yang sesuai dengan sistem pertahanan semesta. Saran penelitian adalah diperlukan perwujudan penataan ruang yang dapat memberdayakan wilayah dengan keseimbangan antara kesejahteraan dan keamanan. Selain itu diperlukan pemberdayaan seluruh unsur masyarakat guna menangkal munculnya paham radikalisme.

Kata Kunci: Sinergitas TNI-Polri; Pencegahan Paham Radikalisme; Program Desa Luwe Issen Mulang.



Abstract

The potential exposure to radicalism in Central Kalimantan ranks fourth nationally. Various efforts to prevent radicalism continue to be promoted by the Central Kalimantan Government. This includes the establishment of the Lewu Issen Mulang Village program to solve several crucial problems that arise among the people of Central Kalimantan and to improve welfare and security. This study aims to analyze the synergy between the TNI and Polri in countering radicalism through the Lewu Issen Mulang Village program in Katingan Regency, Central Kalimantan. This study uses a qualitative approach by collecting data through long-distance interviews with selected sources. The results of this study indicate that the Lewu Issen Mulang Village Program as a pilot project in preventing radicalism in the Katingan Regency of West Kalimantan is in accordance with the concept of preventing radicalism which refers to the cultivation of the Pancasila ideology through the establishment of Lewu Pancasila Village and involving the community as the key to preventing radicalism. This community involvement is explained in the form of citizen control, delegated power, partnership, placation and consultation. The actors in the community who are closely involved in preventing radicalism are the Katingan Regency community itself, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Lurah, Religious Harmony Forum (FKUB) Katingan Regency, Regency Police. Katingan, Dandim 1015/Sampit and the local government of Katingan Regency. The synergy between the TNI and the Police through Issen Mulang Village does not only pay attention to the Kamtibmas aspect but also the aspect of regional resilience in accordance with the universal defense system. The research suggestion is that it is necessary to realize spatial planning that can empower the region with a balance between welfare and security. In addition, it is necessary to empower all elements of society to prevent the emergence of radicalism.

Keywords: TNI-Polri Synergy; Prevention of Radicalism; Luwe Issen Mulang Village Program.

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara demokrasi dengan jumlah penduduk Islam mayoritas dan terbesar di dunia memungkinkan terbukanya peluang bagi kelompok berpaham radikalisme untuk menyampaikan gagasan, pandangan dan prinsip radikalnya. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Wahid Foundation (2021), Indonesia masih rentan terhadap perilaku intoleran dan radikal. Survei Wahid Foundation menemukan sejumlah data yang dinilai cukup mengkhawatirkan. Tercatat, dari total



1.520 responden, sebanyak 59,9 persen memiliki kelompok yang dibenci. Kelompok yang dibenci meliputi mereka yang berlatarbelakang agama nonmuslim, kelompok Tionghoa, komunis, dan lainnya. Dari jumlah 59,9 persen itu, sebanyak 92,2 persen tidak setuju terdapat anggota kelompok yang dibenci menjadi pejabat pemerintah di Indonesia. Sebanyak 82,4 persennya bahkan tidak rela anggota kelompok yang dibenci itu menjadi tetangga mereka.

Dari sisi radikalisme sebanyak 72 persen umat Islam Indonesia menolak untuk berbuat radikal seperti melakukan penyerangan terhadap rumah ibadah pemeluk agama lain atau melakukan sweeping tempat yang dianggap bertentangan dengan syariat Islam. Dan hanya sebanyak 7,7 persen yang bersedia melakukan tindakan radikal bila ada kesempatan dan sebanyak 0,4 persen justru pernah melakukan tindakan radikal. Penyebab terjadinya intoleransi dan radikalisme di tubuh umat Islam Indonesia selain ideologi ialah alienasi dalam sektor sosial dan ekonomi. Survei itu melibatkan 1.520 responden yang tersebar di 34 provinsi.

Belajar dari pengalaman, dalam menangkal paham radikalisme yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah baik itu TNI maupun Polri dirasakan masih belum maksimal. Masih terdapat banyak permasalahan, diantaranya adalah kurangnya pola koordinasi antara TNI dan POLRI untuk mensinergikan upaya sebagai pedoman kerjasama antar instansi dalam menangkal paham radikalisme. Kemudian masih rendahnya kualitas profesionalisme SDM yang terlibat dan belum sinerginya koordinasi lintas instansi dalam menangkal paham radikalisme. Koordinasi yang kurang baik ini terjadi karena kepentingan yang dimiliki masing-masing berbeda-beda dan terakhir permasalahan tersebut yaitu masih terbatasnya sarana prasarana dalam menghadapi paham radikalisme.

Potensi paparan radikalisme di Kalimantan Tengah berada di urutan ke empat secara nasional. Hal ini disampaikan oleh BNPT dalam rapat koordinasi nasional FKPT seluruh Indonesia di Bali pada tanggal 15-17 Desember 2020



(kesbangpol.baliprov.go.id, 2020). Ketua FKPT Kalimantan Tengah, Khairil Anwar, meperkuat hasil riset BNPT, bahwa Kalimantan Tengah, khususnya Palangkaraya pernah memiliki pengalaman kasus pemuda yang terpapar radikalisme. Salah satu Ormas Islam yang radikal berkembang dan menyerap banyak pemuda di Kalimantan Tengah yaitu Front Pembela Islam (FPI) (bnpt.go.id, 2020).

Fakta ini diperkuat dengan adanya fakta lain yaitu terdapat 13 anak yang terpapar radikalisme di Kalimantan tengah yang akan dikirimkan ke balai Kemensos pada 22 Juni 2019 (republika.co.id, 2019). Berbagai Langkah ditempuh aparat keamanan di Kalimantan Tengah. Salah satunya Polda Kalteng bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkominda) terus melakukan upaya-upaya salah satunya pendekatan dengan tokoh adat, agama, tokoh masyarakat, dan organisasi kepemudaan untuk mencegah kemungkinan terjadinya konflik dan memperkecil dampak konflik yang kemungkinan timbul atas konflik suku, ras, dan agama seperti konflik antaretnis di Kabupaten dan Kota Waringin timur pada pertengahan tahun 2000 (liputan6.com, 2019).

Selain upaya diatas, Direktorat Binmas Polda Kalteng mengajak tokoh masyarakat, tokoh agama, serta para influencer se-Kalimantan Tengah dan komponen lainnya serta para Kasabtinmas seluruh Polres Jajaran untuk memahami bahaya masuknya paham radikal di Bumi Tambun Bungai, Kalimantan Tengah (liputan6.com, 2019).

Berbagai upaya lainnya terus digalakkan oleh Pemerintah Kalimantan Tengah. Termasuk pembentukan program Desa Lewu Issen Mulang untuk menyelesaikan beberapa persoalan krusial yang muncul ditengah masyarakat Kalimantan Tengah. Pada 14 Juli 2020, Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran mendukung penuh dicanangkannya program Desa Lewu Issen Mulang yang digagas oleh Kepolisian Daerah Kalteng. Program ini diharapkan menjadi percontohan desa tangguh dari ancaman bencana alam kebakaran hutan dan lahan, terhindar dari



pandemi covid 19 dan tersedianya pangan. Terdapat 14 Desa dan Kelurahan di 14 Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Tengah dijadikan sebagai pilot project Desa Tangguh Issen Mulang (Pantang Mundur). Kehadiran program ini yang mampu menysasar kepada masyarakat secara langsung di 14 Desa dan Keurahan di 14 Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Tengah, diharapkan kedepannya dapat menjadi medium untuk pelaksanaan sinergisitas TNI-POLRI dalam menangkal paham radikalisme yang berkembang di tengah masyarakat Kalimantan Tengah.

Berdasarkan atas fenomena yang telah diuraikan diatas, peneliti merasa perlu adanya sinergisitas antara TNI dan POLRI dalam upaya menangkal paham radikalisme yang berkembang di masyarakat Kalimantan Tengah melalui program Desa Lewu Issen Mulang.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun kasus yang diteliti adalah fenomena penyebaran paham radikalisme yang berkembang di Kalimantan Tengah melalui sinergisitas TNI-POLRI. Diharapkan, dengan pendekatan ini, peneliti mampu mengeksplor aktivitas kehidupan nyata terkait dengan upaya menangkal paham radikalisme yang dilakukan melalui sinergisitas TNI-POLRI di Kalimantan Tengah dalam program Desa Lewu Issen Mulang. Selanjutnya, peneliti juga memberikan gambaran umum terkait dengan subjek dan sampel penelitian, objek penelitian, tempat dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data disertai dengan teknik keabsahan data dan teknik analisis data.

Tempat penelitian dilaksanakan di Kalimantan Tengah. Khususnya di Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Komando Daerah Militer Provinsi Kalimantan Tengah serta Desa yang menjadi percontohan program Desa Lewu Issen Mulang.



3. Hasil dan Pembahasan

Polda Kalimantan Tengah mendirikan 'Desa Pantang Mundur' atau Lewu Isen Mulang pada 2020. Lewu Isen Mulang adalah sebuah upaya kolaboratif dengan stakeholder berupa gerakan atau aksi nyata di daerah untuk mencegah karhutla, sebagai lumbung pangan ketahanan pangan dan mencegah penyebaran Covid-19. Menitikberatkan kepada keterlibatan elemen masyarakat yang aktif baik secara personal ataupun kelompok di Desa.

Adanya Desa Pantang Mundur ini diharapkan agar masyarakat lebih siap dalam menanggulangi segala bentuk bencana yang terjadi harapan saya agar semua pihak berkolaborasi untuk mendukung program-program dari Desa pantang mundur atau Lewu Isen Mulang ini karena tanpa adanya dukungan dari semua pihak dan masyarakat semua tentunya tidak akan berhasil secara maksimal.

Program Lewu Isen Mulang ini dilakukan dengan pembinaan terhadap 3 aspek penting yang menjadi indikator dalam program ini yaitu:

1. Adanya pembentukan posko Covid-19 untuk deteksi awal dan petugas posko wajib memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai protokol kesehatan;
2. Adanya pembentukan posko karhutla yang bertugas untuk memberikan imbauan kepada warga tentang larangan membakar hutan dan lahan serta kesiapan desa dalam penanganannya;
3. Pembinaan ketahanan pangan agar bisa memenuhi kebutuhan warga secara mandiri.

Program Desa Lewu Isen Mulang Dalam Menangkal Paham Radikalisme Yang Berkembang Di Masyarakat Kalimantan Tengah

Menghadapi ancaman non militer Pemerintah Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah memberi perhatian utama dalam mengelola sumber daya lokal untuk mendukung pertahanan wilayah. Serta cegah dini ancaman non-militer



Pemda Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah melakukan sinergitas dengan berbagai komponen kemitraan strategis di masyarakat.

Program Desa Lewu Issen Mulang adalah sebuah Kolaboratif dengan stakeholder berupa aksi nyata di daerah dengan menitikberatkan pada keterlibatan elemen masyarakat yang aktif baik secara personal maupun kelompok. Direktif Kapolda Kalteng no 01/ V/ 2020 tanggal 24 Mei 2020 tentang launching program Lewu Issen Mulang dilaksanakan di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah.

Dengan mengobarkan semangat Issen Mulang diharapkan menimbulkan sikap optimis semangat juang menghadapi pandemi Covid-19 dan Karhutla serta bentuk kejahatan yang bisa merusak semangat masyarakat itu sendiri seperti bahaya paham radikal yang bisa mengarah kepada intoleransi dan perpecahan dikalangan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu diharapkan melalui Desa Lewu Issen Mulang di Kalimantan Tengah, ormas-ormas dan para tokoh masyarakat bersama-sama mencegah masuk dan berkembangnya paham radikalisme di wilayahnya demi menjaga pesatuan dan kesatuan serta menjaga keutuhan bangsa.

Wahid Foundation (2016) mendefinisikan radikalisme sebagai sikap atau tindakan yang mengatasnamakan agama yang tidak sejalan dengan dasar atau prinsip dasar kehidupan berbangsa yang menjunjung tinggi toleransi dan terbuka terhadap sesama warga yang majemuk yang dijamin keberadaannya oleh konstitusi, atau yang bertumpu pada prinsip-prinsip kemanusiaan. Bertolak pada definisi tersebut, studi ini melihat radikalisme tidak hanya dipahami pada tataran sikap/tindakan melainkan juga gagasan. Sementara itu, dalam studi ini yang dimaksud dengan prinsip dasar kehidupan berbangsa ialah nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

Untuk melakukan upaya dalam pencegahan gerakan radikalisme tidaklah mudah dan membutuhkan strategi yang terstruktur, sistematis dan massif. Untuk itulah, penting adanya pemahaman yang komprehensif tentang gerakan radikalisme



dan melakukan pencegahan terhadap gerakan radikalisme tersebut melalui penanaman ideologi Pancasila dan budaya sadar konstitusi berbasis komunitas.

Dari berbagai kasus yang terjadi di Kalimantan Tengah, menurut BNPT, potensi paparan radikalisme di Kalimantan Tengah berada di urutan ke empat secara nasional. Namun berdasarkan mapping di lapangan dan koordinasi dengan berbagai Elemen, Ormas / Pengurus Pondok Pasantren, Tokoh Masyarakat dan Instansi terkait di Kabupaten Katingan, sampai dengan saat di wilayah Kabupaten Katingan kegiatan masyarakat dan keagamaan masih berjalan sesuai dengan syariat dan akidah masing-masing dan belum ditemukan masyarakat yang terpapar paham Radikal.

Kapolda sudah memerintahkan Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam) agar berkoordinasi dengan Badan Intelijen Daerah (Binda) Kalteng dan instansi terkait dalam penanganan ancaman radikalismen tersebut. Strategi dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Polres Katingan dalam menangkal paham Radikalisme di Kabupaten Katingan di lihat dari kacamata pertahanan negara.

Selanjutnya, berdasarkan Direktif Kapolda Kalteng no 01/ V/ 2020 tanggal 24 Mei 2020 tentang launching program Lewu Issen Mulang dilaksanakan di Desa Menteng kecamatan Jekanraya Kota Palangkaraya Kalteng. Lewu Issen Mulang adalah sebuah Kolaboratif dengan stockholder berupa aksi nyata di daerah dengan menitikberatkan pada keterlibatan element masyarakat yang aktif baik secara personal maupun kelompok. Awalnya Program Lewu Issen Mulang dicanangkan untuk ancaman yang sangat perlu untuk mendapatkan perhatian dan tindakan serius diantaranya Covid 19 dan Karhutla.

Program tersebut berhasil mengobarkan semangat Issen Mulang yang menimbulkan sikap optimis semangat juang seluruh komponen menghadapi pandemic Covid-19 dan Karhutla di Kalimantan Selatan. Dengan demikian semboyan suku dayak ini diyakini dapat di terapkan di seluruh wilayah Kalimantan, karena merupakan kearifan lokal bagi sebagian besar masyarakat



Kalimantan. Pemerintah, TNI dan Polri dapat memberdayakan masyarakat Kalteng melakukan perlawanan terhadap serangan diantaranya Covid 19 dan Karhutla tanpa hambatan yang signifikan.

4. Analisis

Penjelasan di atas dapat dimaknai bahwa Program Lewu Issen Mulang dapat diterapkan di berbagai Desa di wilayah Kalimantan Tengah, bahkan di seluruh wilayah Kalimantan, karena penduduk suku Dayak pesebarannya hampir di seluruh wilayah Kalimantan. Dengan demikian Program Desa Lewu Issen Mulang dapat diadopsi oleh pemangku kepentingan di seluruh wilayah Kalimantan.

Lebih lanjut, dalam hal penanaman ideologi Pancasila, telah dijalankan dalam program Desa Lewu Pancasila. Tujuan dibentuknya Desa Lewu Pancasila sendiri adalah meningkatkan kerukunan dan sikap toleransi antar umat beragama, serta melestarikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Pembentukan program Desa Lawu Issen Mulang sebagai pilot project dalam pencegahan radikalisme di wilayah Kalimantan Tengah akan dibahas dengan teori *The Ladder of Citizen* dari Sherry Arnstein (1971).

Sebagaimana disampaikan sebelumnya dalam pencegahan radikalisme di kalangan masyarakat diperlukan strategi dan keterlibatan masyarakat itu sendiri. Partisipasi masyarakat adalah sesuatu melibatkan masyarakat bukan hanya kepada proses pelaksanaan kegiatan saja, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam hal perencanaan dan pengembangan dari pelaksanaan program tersebut, termasuk menikmati hasil dari pelaksanaan program tersebut.

Sehingga berdasarkan teori *The Ladder of Citizen* (Sherry R Arnstein, 1971) yang membagi jenjang partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, maka partisipasi masyarakat Kabupaten Katingan dalam pencegahan radikalisme melalui program Desa Issen Mulang Radikalisme adalah sebagai berikut:



Citizen control, masyarakat dapat partisipasi di dalam dan mengendalikan seluruh proses pengambilan keputusan.

Filosofi Issen Mulang memiliki cakupan yang luas dan fleksibel serta memiliki jangkauan jauh ke depan sehingga dapat diaplikasikan di mana pun, dan oleh siapa pun untuk berbagai kepentingan termasuk untuk menangkal paham radikalisme. Seiring perkembangan zaman Issen Mulang sendiri bermakna ketangguhan dan keuletan masyarakat suku Dayak dalam menghadapi tantangan dinamika pembangunan.

Dalam hal ini masyarakat menjadi unsur penting yang akan terlibat dalam pengembangan program Desa Issen Mulang menangkal radikalisme di wilayahnya. Babinsa dan Babinkamtibmas hingga RT, RW harus terus aktif berkomunikasi dengan warga dan masyarakat. Ajak dan beri pengertian kepada masyarakat untuk segera melaporkan jika ada hal-hal yang mencurigakan di sekitarnya. Selanjutnya ditindaklanjuti sesuai SOP agar tidak ada kelambatan. Jika ditemukan ada ajaran yang menyimpang maka segera diambil sikap sebelum terlambat. Hal ini menunjukkan adanya partisipasi masyarakat dalam mengidentifikasi dan mencegah radikalisme di Kabupaten Katingan Kalteng dan memenuhi aspek citizen control.

Delegated power, pada tingkatan ini masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk membuat keputusan pada rencana tertentu.

Dalam lingkup Kabupaten sebagai sebuah wilayah pertahanan, Polri dan TNI serta Pemda Kabupaten Katingan telah menjalankan program-program yang bertujuan untuk mencegah radikalisme di wilayah Kabupaten Katingan. Akan tetapi, dalam lingkup yang lebih kecil, masyarakat dalam hal ini kepala keluar adalah aktor utama dalam mencegah radikalisme itu sendiri.

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat dapat menjadi hulu atau benteng awal dalam mengidentifikasi potensi, mencegah, sekaligus menangkal radikalisme yang masuk ke ranah keluarga. Anggota keluarga dapat menjadi tameng dari radikalisasi jika terjalin komunikasi dan kepedulian antar anggota



keluarga. Tidak hanya dalam lingkup keluarga inti, melainkan dapat juga dapat melibatkan keluarga besar untuk ikut berperan serta.

Orang tua untuk mencegah masuknya paham radikalisme pada anak, di antaranya memberikan pemahaman agama secara benar dan utuh kepada anak, mengajak anak untuk mengenal ragam budaya dan agama di Indonesia agar lebih mengenal nilai kebhinekaan, memberikan pemahaman kepada anak tentang bahaya gerakan radikalisme, hingga memperkuat Pancasila sebagai ideologi bangsa dalam implementasi atau praktik kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini suku Dayak yang dengan semboyan yang melekat pada kelompok masyarakat Kalimantan Tengah sangat relevan dengan konsep Sihankamrata sehingga menjadi modal sosial yang kuat bagi TNI dan Polri untuk mewujudkan ketahanan masyarakat dan ketahanan wilayah serta penegakan dan perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku radikalisme di wilayah Kalimantan tengah.

Partnership, masyarakat berhak berunding dengan pengambil keputusan atau pemerintah, atas kesepakatan bersama kekuasaan dibagi antara masyarakat dengan pemerintah.

Lewu Issen Mulang adalah sebuah Kolaboratif dengan stockholder berupa aksi nyata di daerah dengan menitikberatkan pada keterlibatan element masyarakat yang aktif baik secara personal maupun kelompok. Oleh karena itu, dalam program Lewu Issen Mulang masyarakat dapat bekerjasama dengan Polresta Kabupaten Katingan, Dandim 1015/Sampit serta Pemerintah Kabupaten Katingan Kalteng dalam menentukan program-program yang dapat diterapkan guna mencegah radikalisme yang ada di wilayah Kabupaten Katingan Kalteng.

Dalam hal ini kerjasama antara tiga pilar yaitu: Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Lurah di Desa Issen Mulang Kabupaten Katingan Kalteng memainkan peran penting dalam pencegahan radikalisme, terutama dalam hal deteksi dini. Sebagai garda terdepan yang berinteraksi dengan masyarakat, tiga pilar Kamtibmas mengemban fungsi basis deteksi, dimana dalam hal ini baik Bhabinkamtibmas,



Babinsa maupun Lurah melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk mendeteksi aktivitas kelompok radikal di wilayah. Untuk itu, kemampuan deteksi dini perlu ditingkatkan demi menekan penyebaran paham radikalisme dan aksi terorisme itu sendiri. Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Lurah harus bergerak dengan sigap dan taktis agar sel-sel radikalisme tersebut tidak tumbuh subur di Kabupaten Katingan Kalteng.

Placation, pemegang kekuasaan (Pemerintah) perlu menunjuk sejumlah orang dari bagian masyarakat yang dipengaruhi untuk menjadi anggota suatu badan publik, dimana mereka mempunyai akses tertentu pada proses pengambilan keputusan.

Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggal pun dapat berperan aktif dalam melakukan pencegahan terhadap terorisme dan radikalisme. Sebab, masyarakat lah yang paling mengetahui kondisi di lingkungan. Sehingga masyarakat diharapkan meningkatkan kepekaan dan kemampuan mendeteksi bibit-bibit radikalisme dan terorisme yang sekiranya muncul di lingkungan sekitarnya. Hal ini merupakan bentuk implementasi aspek placation dimana masyarakat dan tiga pilar Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Lurah memiliki akses melalui Polresta Kab. Katingan, Dandim 1015/Sampit dan Pemda Kab Katingan pada proses pengambilan keputusan dalam hal pencegahan radikalisme di Desa Issen Mulang Kabupaten Katingan Kalteng.

Consultation, masyarakat tidak hanya diberitahu tetapi juga diundang untuk berbagi pendapat, meskipun tidak ada jaminan bahwa pendapat yang dikemukakan akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Di samping peran Polri dan TNI serta Pemda Kabupaten Katingan Kalteng dalam membendung paham radikalisme dan terorisme, melalui program yang telah ada. Dibutuhkan pula peran segenap elemen masyarakat untuk ikut serta bahu membahu. Salah satunya, keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat dalam



Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang ada di Kabupten Katingan Kalteng.

Pembentukan FKUB Kabupaten Katingan Kalteng dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah. Adapun Tugas FKUB itu sendiri adalah melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota, melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat, memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.

Dalam hal tingkat solidaritas dan kebersamaan warga Kabupaten Katingan sangat besar dan telah teruji, baik teruji karena peristiwa konflik Sampit maupun telah teruji karena kebersatuan karena isu-isu politik. Walaupun ada pihak pihak yang berupaya memanfaatkan keberagaman guna kepentingan golongan tertentu, persatuan umat beragama di Kabupaten Katingan Kalteng tetap solid.

Sinergisitas TNI-POLRI Dalam Menangkal Paham Radikalisme Yang Berkembang Di Masyarakat Kalimantan Tengah Melalui Program Desa Lewu Issen Mulang.

Sinergitas Polri dalam hal ini Polresta Kabupaten Katingan bersama dengan unsur terkait lainnya terutama Kodim 1015/Sampit dan didukung oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Katingan serta masyarakat dalam menangkal paham radikalisme sangat dibutuhkan. Dengan bercermin pada keberhasilan penanganan Covid-19 melalui Program Desa Lewu Issen Mulang di Wilayah Kabupaten Katingan. Sinergitas TNI-Polri melalui Program Desa Lewu Issen Mulang diyakini dapat dikembangkan untuk mengatasi permasalahan lainnya, terutama untuk menangkal paham radikalisme.



Berdasarkan informasi dari Kapolda Kalimantan Tengah, sejauh ini dalam kegiatan penanganan Covid-19, tidak terdapat kendala/hambatan dalam pengimplementasian Program Desa Lewu Issen Mulang di Wilayah Kabupaten Katingan. Dalam pelaksanaan Program Desa Lewu Issen Mulang, Polres Katingan melibatkan Lurah / Kades, Babinsa, ketua RT dan para Tokoh yang ada pada lokasi tersebut. Hubungan antara Polres Katingan dengan Unsur-unsur lain terutama TNI juga terjalin serta terbina dengan sangat baik. Oleh sebab itu Polda Kalimantan Tengah terus berupaya mengimplementasikan program Desa Lewu Issen Mulang ke dalam berbagai kegiatan dalam menjaga Keamanan Kamtibmas di wilayah Kalimantan Tengah.

Terkait dengan masalah ancaman Radikalisme, Polda Kalimantan Tengah selalu melakukan pendekatan kepada Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Adat untuk membentuk pola pikir yang positif terhadap permasalahan yang dihadapi. Kegiatan tersebut dilakukan dengan berbagai metode, diantaranya melakukan penyuluhan melalui Forum Grup Discussion (FGD); membentuk kesepakatan bersama atau ikrar bersama untuk "Cinta NKRI", menyelenggarakan seminar keagamaan; serta menjalin pola kerjasama kemitraan dengan Polri.

Strategi dan Upaya yang sudah dilaksanakan Polda Kalimantan Tengah dalam menangkal paham radikalisme adalah melakukan koordinasi secara intens dengan Forkopimda dan para tokoh di Kalimantan Tengah baik secara insidental maupun terprogram agar dapat mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas sejak dini secara cepat. Dengan meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang erat serta intergitas diharapkan dapat meningkatkan kestabilan Kamtibmas di wilayah Kalimantan Tengah sehingga dapat meminimalisir ancaman radikalisme.

Penggunaan kekuatan dan kemampuan TNI dalam menangani masalah radikalisme di Kalimantan Tengah maupun di wilayah lainnya sesuai aturan yang berlaku, yaitu apabila diminta bantuannya baik oleh Polri maupun Pemerintah



Daerah. Sementara TNI sendiri memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di wilayah kewenangannya.

Sinergitas TNI dengan Polri tersebut tujuannya untuk mengkolaborasikan antara ketahanan wilayah dan ketahanan masyarakat dalam menangkal paham radikalisme di Kalimantan Tengah. Sesuai prinsip sistem pertahanan semesta, salah satu konsep untuk membangun ketahanan wilayah dan ketahanan masyarakat adalah dengan memberdayakan kearifan lokal yang ada di lingkungan masyarakat tersebut. Kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Kalimantan Tengah adalah Issen Mulang. Terkait dengan itu, Pemerintah Daerah tengah mencanangkan Program Desa Lewu Issen Mulang dalam kebijakan Pembangunan. Sejalan dengan program tersebut maka sinergitas TNI-Polri ditujukan untuk kegiatan menangkal paham radikalisme dengan memberdayakan kearifan lokal, yaitu Program Desa Lewu Issen Mulang.

Sinergitas TNI-Polri dalam menangkal paham radikalisme yang berkembang di masyarakat Kalimantan Tengah melalui Program Desa Lewu Issen Mulang dapat dikatakan sebagai suatu hasil dari suatu proses perpaduan dari cara-cara dan perpaduan gagasan yang dijalankan oleh TNI-Polri dan Masyarakat dalam mengatasi masalah. Sinergitas TNI-Polri menunjukkan pihak-pihak yang saling percaya dan bersikap saling mendukung untuk menghasilkan suatu gagasan baru yang benar-benar memberikan kepuasan secara intrinsik baik bagi TNI-Polri, Masyarakat, maupun pengikut paham radikalisme yang statusnya sebagai korban kepentingan.

Adapun upaya menangkal paham radikalisme yang berkembang di masyarakat Kalimantan Tengah yang dapat dilakukan antara lain:

a. Meningkatkan komunikasi, komunikasi, dan kolaborasi untuk menumbuhkan rasa saling percaya dalam melaksanakan pembinaan yang berhubungan dengan kehidupan sosial masyarakat.



Sebagaimana menurut Handoko (2017), sinergisitas dibangun melalui komunikasi dan koordinasi. Dalam hal ini komunikasi harus dijalin secara sungguh-sungguh oleh TN-Polri serta seluruh instansi yang terlibat dalam pencegahan radikalisme, sehingga pesan ini dapat diterima dan dimengerti oleh masyarakat. Hal ini penting agar masyarakat sebagai pelaku dalam program Desa Issen Muleng dapat melaksanakan program tersebut sehingga tujuan pembentukan Desa Issen Muleng dapat tercapai optimal.

b. Mewujudkan tatakelola yang terkolaborasi dengan memperhatikan indikator *Networked structure, Commitment to common purpose, Trust among the participants, Governance, Access to authority, Distributive accountability/responsibility, Information sharing, dan Access to resources*. Hal ini diperlukan agar tata kelola dimana unsur Pemerintah dan masyarakat/swasta bekerja sama dengan dalam program Desa Issen Muleng dapat menjalankan program dengan ketetapan proses, hukum atau aturan dalam penentuan tindakan/kegiatan dapat terpenuhi dengan baik.

c. Penegakkan secara hukum yang dibarengi dengan pembinaan ideologi melalui pendekatan resolusi konflik yang humanis agar mereka yang terlanjur dalam kesesatan mau kembali kepada keyakinan yang benar.

5. Kesimpulan

Program Desa Lewu Issen Mulang sebagai pilot project dalam pencegahan radikalisme di wilayah Kabupaten Katingan Kalbar telah sesuai dengan konsep pencegahan paham radikalisme yang mengacu pada penanaman ideologi Pancasila melalui pembentukan Desa Lewu Pancasila. Selain itu, program Desa Issen Muleng ini telah melibatkan masyarakat sebagai kunci pencegahan radikalisme. Keterlibatan masyarakat ini dijelaskan berupa *citizen control, delegated power, partnership, placation dan consultation*. Adapun aktor-aktor dalam masyarakat yang terlibat erat dalam pencegahan radikalisme adalah Masyarakat Kabupaten Katingan itu sendiri,



Bhabinkamtibmas, Babinsa, Lurah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupten Katingan, Polresta Kab. Katingan, Dandim 1015/Sampit dan Pemda Kab Katingan. Sinergisitas TNI-Polri menunjukkan pihak-pihak yang saling percaya dan bersikap saling mendukung untuk menghasilkan suatu gagasan baru yang benar-benar memberikan kepuasan secara intrinsik baik bagi TNI-Polri, Masyarakat, maupun pengikut paham radikalisme yang statusnya sebagai korban kepentingan di Kabupaten Katingan Kalteng. Menangkal paham radikalisme yang berkembang di masyarakat Kalimantan Tengah juga harus memperhatikan kondisi geografi, demografi dan kondisi sosial masyarakat setempat sebagai ruang, alat dan kondisi juangnya untuk membentuk ketahanan masyarakat dan ketahanan wilayah. Sehingga keluaran dari Sinergisitas TNI-Polri melalui Desa Issen Mulang tidak hanya sekedar memperhatikan aspek Kamtibmas tetapi juga aspek ketahanan wilayah yang sesuai dengan sistem pertahanan semesta.

6. Saran

6.1. Kepada Pimpinan Kementerian Pertahanan, Polri, Kemendagri, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, agar dapat mengimplementasikan kebijakan yaitu Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang agar sesuai dengan tujuan penataan wilayah sebagaimana diamanatkan dalam UU ini, antara lain, agar tercapai pemanfaatan ruang yang berkualitas seperti mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan; dan mewujudkan keseimbangan antara kepentingan kesejahteraan dan keamanan; Mengimplementasikan program pemberdayaan wilayah pertahanan sesuai sistem pertahanan semesta melalui aktualisasi program yang similar dengan Desa Lewu Issen Mulang yang di perlombakan untuk memunculkan pilot project Desa tangguh terhadap hasutan paham radikalisme.



6.2 Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah agar dapat memberdayakan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk membina keyakinan beragama dan pemahaman terhadap ideologi negara serta melakukan pengawasan sampai daerah desa oleh kekuatan 3 pilar Babinsa Babinkamtibmas dan Kepala Desa; Menggaungkan Program Desa Lewu Issen Mulang agar dapat terselenggara di seluruh Kalimantan menjadi program unggulan yang mampu efektif menangkal munculnya paham Radikalisme di masyarakat Kalteng.

Daftar Pustaka

- Arnstein, Sherry R. (1969). A Ladder of Citizen Participation, JAIP, Vol. 35, No. 4, July 1969, pp. 216-224.
- bnpt.go.id. (2020). Pelajar Dan Pemuda Di Kalteng Diingatkan Bahaya Radikalisme Dan Terorisme. Diakses pada <https://www.bnpt.go.id/pelajar-dan-pemuda-di-kalteng-diingatkan-bahaya-radikalisme-dan-terorisme>
- Handoko. (2017), Manajemen; Edisi Kedua, Cetakan Ketigabelas, BPFE Yogyakarta.
- kesbangpol.baliprov.go.id. (2020). Penutupan Rakornas FKPT Tahun 2020 di Bali. Diakses pada <https://kesbangpol.baliprov.go.id/penutupan-rakornas-fkpt-tahun-2020-di-bali/>.
- liputan6.com. (2019). Nongol Babat, Strategi Polda Kalteng Cegah Konflik dan Radikalisme. Diakses pada <https://www.liputan6.com/news/read/4127560/nongol-babat-strategi-polda-kalteng-cegah-konflik-dan-radikalisme>
- republika.co.id.(2019). Kemensos Dampingi 13 Anak Terpapar Radikalisme di Kalteng. Diakses pada <https://republika.co.id/berita/pti6vn320/network>
- Wahid Foundation. (2021). RI Masih Rentan Intoleransi, Wahid Foundation Sampaikan Enam Rekomendasi. <http://wahidfoundation.org/index.php/news/detail/RIMasih-Rentan-Intoleransi-Wahid-Foundation-Sampaikan-Enam-Rekomendasi>.